

Problema Sosial dan Ekologis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Desa

Murdianto, Murdianto¹, A. Ainun Zeva Zachari²

¹ Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Indonesia; murdianto@unu-jogja.ac.id

² Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia; aainun.2022@student.uny.ac.id

Article history

Received: 20/04/2026 Revised: 18/05/2026 Accepted: 19/05/2026

Abstract

Village tourism-based community empowerment in Indonesia has implications for several social issues. This study aims to map an socio-ecological problem and fundamental criticisms of village tourism-based community empowerment programs. This study uses a qualitative research with a literature study or library research on ten previous studies published from 2017 to 2025. The data collection technique uses documentation, wit content analysis as the data analysis technique. The three conclusions of this study are village tourism-based community empowerment has given rise to several anomalies: 1) extreme changes and dependence on tourism sector revenues, 2) land conversion and capitalization, and 3) disparities between village elites and ordinary citizens. This research has implication for on-going research effort to improve the concept and implementation of village community empowerment programs, to make the more participatory, transparent and sustainable

Keywords

community empowerment; village tourism; social and ecological problem



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. INTRODUCTION

Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dianggap memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan kinerja ekonomi negara dan sekaligus membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat. Promosi wisata dalam skala besar telah menjadi salah satu program pemerintah dari berbagai level pemerintahan di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan andalan untuk meningkatkan pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun cadangan devisa negara. Cadangan Devisa ini diharapkan datang dari kunjungan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.

Perkembangan industri pariwisata dalam sepuluh tahun terakhir diarahkan ke tingkat level pemerintahan paling rendah yakni di tingkat desa. Pengembangan pariwisata desa dianggap dapat mencapai tujuan utama pemberdayaan masyarakat ditingkat desa. Pengembangan pariwisata pedesaan dinilai efektif menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, menekan angka kemiskinan, dan merangsang intgrasi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Berangkat dari latar belakang tersebut, pemerintah pusat mulai melaksanakan Program Dana Desa pada tahun 2015. Dana Desa

merupakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan dalam pembangunan desa. Prioritas alokasi dana desa adalah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan infrastruktur pedesaan, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dengan merevitalisasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang menjalankan usaha lokal, seperti pariwisata desa (Sidik, 2025).

Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan nasional, pengembangan pariwisata desa mendapat tempat tersendiri karena dinilai sebagai sektor industri yang begitu potensial. Pengembangan pariwisata pedesaan sebagai strategi pembangunan nasional berkelanjutan banyak diterapkan negara berkembang. Hal ini dikarenakan demografi mayoritas yang penduduknya berada di daerah pedesaan dengan keterikatan terhadap alam, budaya, dan adat istiadat yang tinggi (Arintoko, et.al., 2020). Desa wisata berbasis komunitas juga diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuannya, perencanaan program dirancang agar dapat memberikan peluang bagi peningkatan modal sosial dan pengembangan kapasitas masyarakat setempat. Dengan begitu, individu masyarakat dapat memperoleh keuntungan sebagai subjek dalam industri pariwisata dan agen dalam jaringan sosial Desa Wisata yang saling terintegrasi (Manaf, et.al., 2018).

Narasi arus utama yang menempatkan pengembangan desa wisata berbasis komunitas sebagai motor pemberdayaan masyarakat ini, nampaknya perlu dikaji ulang. Temuan dalam berbagai literatur menyatakan, Pengembangan pariwisata desa berbasis komunitas justru menimbulkan permasalahan baru. Mayoritas pengembangan desa wisata hanya menekankan keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, sebagaimana dinyatakan Lasso & Dahles (2018) dalam penelitiannya berjudul *“Are tourism livelihoods sustainable? Tourism development and economic transformation on Komodo Island, Indonesia”*. Kondisi ini pada banyak kasus, secara radikal mengubah mata pencaharian penduduk setempat yang sebelumnya berorientasi agrikultur menjadi *“mata pencaharian pariwisata”*. Perubahan ini dicirikan dengan ketergantungan ekstrem pada pemasukan yang dihasilkan melalui kegiatan berbasis pariwisata (Lasso & Dahles, 2018).

Peralihan orientasi mata pencaharian yang selanjutnya menimbulkan ketergantungan ekstrem masyarakat desa terhadap industri pariwisata mengindikasikan konsep ini telah tercerabut dari orientasi awalnya. Literatur lain oleh Sidik (2024) memaparkan bagaimana Program Dana Desa di Indonesia yang berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata, disaat bersamaan memperparah kesenjangan pendapatan di pedesaan. Temuan dalam penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana ketimpangan antara elit desa dengan warga desa timbul melalui program pengembangan desa wisata. Hal tersebut disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap pendapatan desa wisata. Elit desa yang

memperoleh enam kali lipat pendapatan lebih besar dibandingkan masyarakat non-elit. Mereka menggunakan kekuasaan politik dan sosial untuk mengatur alokasi dana serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun BUMDes dirancang sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal, sebagian besar keuntungan hanya jatuh ke tangan elit desa.

Tulisan ini ditujukan sebagai sebetuk deskripsi secara kritis pengembangan pariwisata desa berbasis komunitas yang mulanya dirancang pemerintah Indonesia sebagai motor pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari beberapa permasalahan diatas, makalah ini disusun sebagai narasi kritis, bahan evaluasi serta pengayaan kajian pemberdayaan masyarakat desa berbasis pariwisata desa

2. METHODS

Tulisan ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni studi literatur. Secara umum, metode kualitatif berfokus pada pemaparan naratif, gambar, dan objek saat pengumpulan serta analisis data. Selain itu metode ini bersifat konstruktif, interpretatif, dan induktif, meski peneliti dapat mengambil berbagai bentuk lain dan tidak selalu mematuhi ketiga fitur ini (Foster, et.al., 2021). Selain itu, pola, kategorisasi, dan tema yang dibangun menggunakan metode kualitatif disusun secara *bottom up*. Konstruksi data menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan mengorganisir data ke dalam unit informasi yang semakin abstrak. Peneliti kualitatif biasanya menyusun hasil temuan dengan melakukan abstraksi dari berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, daripada bergantung pada satu sumber data (Creswell, 2009).

Dalam rangka pengumpulan serta analisis data penelitian ini menggunakan studi pustaka. Desain ini merekomendasikan mekanisme pengumpulan data yang dihimpun dari literatur seperti temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Agar lebih relevan dengan topik yang diangkat, sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah literatur ilmiah seperti artikel jurnal, buku, hasil skripsi, disertasi dan tesis dengan isu pariwisata desa. Metode ini dipilih dalam rangka menghimpun data yang telah melalui proses ilmiah. Disamping itu metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari beragam kasus, sehingga sudut pandang yang diperoleh semakin luas.

Sebanyak sepuluh literatur relevan dikumpulkan sebagai sumber data. Delapan diantaranya merupakan artikel jurnal, satu makalah penelitian dan satu tesis. Topik pada sepuluh literatur yang terkumpul berkuat pada isu pengembangan wisata desa seperti pada artikel berjudul "*Community Based Tourism Village Development Strategies: A Case Of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia*", oleh Arintoko et.al. (2020) dan "*Community-Based Rural Tourism in Inter Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia*" oleh Manaf, et. al. (2018). Selain itu sebagian literatur yang dihimpun juga

membahas transisi mata pencaharian sebagaimana ditemukan pada *“Are tourism livelihoods sustainable? Tourism development and economic transformation on Komodo Island, Indonesia”* oleh Lasso & Dahles (2018) Serta isu Alih fungsi lahan, upah pekerja pariwisata dan kapitalisasi pedesaan yang dapat ditemukan dalam disertasi oleh Ristiawan (2024) berjudul *“Commodifying Landscapes for Tourism”*, artikel berjudul *“Kajian Literatur Tuntutan Hak Tenaga Kerja Pariwisata Di Indonesia”* oleh Ramadhani, et.al. (2023), artikel jurnal *“Rural Capitalization and Agrarian Transformation in the Ciwidey Highlands, West Java, Indonesia”*, *“The Village Fund, Village Tourism Development, and Its Impact on Income Inequality in Rural Indonesia: How do Village Elites Shape It?”* oleh Sidik (2021), Riset berjudul *“Land capitalization model for sustainable tourism based on PLS-SEM”* serta yang terakhir adalah *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Pariwisata Bali atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Pandemi Covid-19”* oleh Thalib & Maniarni (2021)

Setelah sumber data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*). Teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya: *Reduksi Data*, Pembacaan terhadap sumber literatur untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tahap ini juga berfungsi sebagai seleksi dan eliminasi untuk informasi yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. *Kategorisasi dan koding*. Data relevan yang telah dihimpun melalui tahap reduksi akan dikategorisasikan sesuai dengan tema dalam sub-bab pembahasan. Tahap ini berperan sebagai identifikasi konsep-konsep utama, isu-isu krusial, serta koherensi antartema. *Intepretasi dan Abstraksi* Pada tahap ini, konsep, tema serta isu yang telah diidentifikasi akan dengan tujuan menarik intisari sumber data secara kontekstual dan reflektif. Selain itu, peneliti juga melakukan abstraksi dengan menyusun temuan secara naratif, mempertimbangkan rasionalisasi keterkaitan antar kategori, lalu menghubungkannya dengan rancangan teori dan temuan pengamatan sebelumnya. *Penarikan Kesimpulan*, Setelah ketiga tahap selesai dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan, menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dan memaparkan sintesis terhadap sumber literatur yang dikaji.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Kajian terhadap sepuluh penelitian yang memetakan problem pembedayaan masyarakat desa melalui pariwisata desa menunjukkan program ini menimbulkan beberapa masalah sosial dan lingkungan yang baru. Tiga temuan penelitian ini adalah:

Perubahan Ekstrem Orientasi Mata Pencarian Masyarakat Desa

Sektor wisata seringkali dipromosikan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di kawasan

rural. Narasi ini digadang-gadang mampu memberdayakan masyarakat dengan menjanjikan swadaya ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan finansial. Faktanya, saat diteliti lebih jauh, temuan pada literatur menunjukkan indikasi kuat bahwa pengembangan pariwisata justru menimbulkan perubahan ekstrem orientasi masyarakat desa, yang tidak selalu berakhir pada pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Umumnya, masyarakat pedesaan di Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian (agrikultur), perikanan, atau kerajinan tangan. Mata pencarian ini menjadi basis sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Namun, masuknya narasi pariwisata desa secara signifikan menggeser orientasi masyarakat desa dari sektor-sektor ini menuju sektor jasa pariwisata. Lasso & Dahles (2018), dalam studinya di pulau Komodo, secara eksplisit menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memicu transisi ekonomi yang cukup ekstrem. Transisi ini terlihat melalui peralihan orientasi mata pencaharian masyarakat desa dari pekerjaan tradisional ke pekerjaan yang terkait langsung dengan pariwisata, seperti *Tour guide*, pengelola penginapan kecil, pedagang suvenir, atau pelayan restoran. Kasus serupa disampaikan oleh Setiadi et al. (2022).

Temuan hasil penelitiannya memaparkan, fenomena pengembangan pariwisata desa yang kian massif di Dataran Tinggi Ciwidey, Jawa Barat menimbulkan kapitalisasi pedesaan yang secara langsung berimbas pada pergeseran mata pencarian dari petani menjadi buruh sektor pariwisata. Munculnya orientasi mata pencaharian baru ini, di satu sisi memang membuka akses terhadap pendapatan yang mungkin sebelumnya tidak tersedia sebagaimana disampaikan Arintoko et al. (2020) melalui risetnya terhadap wisata di wilayah Borobudur. Fenomena yang sama di potret oleh penelitian di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul oleh Manaf et al. (2018), yang memperlihatkan bagaimana pariwisata dapat mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Eskalasi ketergantungan terhadap sektor pariwisata ini juga berakibat buruk. Profesi di sektor pariwisata, khususnya di Indonesia seringkali bersifat informal, musiman, kurangnya jaminan kerja, rentan terhadap fluktuasi pasar, kondisi ekonomi global, hingga pandemi. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dialami pekerja pariwisata di Bali akibat pandemi COVID-19 (Thalib & Meniarni, 2021) adalah bukti nyata kerentanan ini. Ketika sektor pariwisata lesu, masyarakat yang telah beralih sepenuhnya ke sana akan kehilangan sumber pendapatan utama tanpa memiliki jaring pengaman dari sektor tradisional yang telah mereka tinggalkan. Lebih jauh, pergeseran ekstrem ini juga mempengaruhi dinamika sosial dan mobilitas kelas.

Fagertun (2017), meskipun berfokus pada Bali urban, memberikan gambaran relevan tentang bagaimana pekerjaan di sektor pariwisata informal seringkali dicirikan oleh upah rendah, kurangnya jaminan sosial, dan peluang mobilitas sosial yang terbatas bagi sebagian besar pekerja. Pekerja yang memiliki keterampilan tinggi atau modal mungkin dapat meningkatkan status sosial mereka, namun banyak yang terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah yang tidak stabil. Ini menimbulkan pertanyaan

kritis tentang "keberlanjutan mata pencarian pariwisata" itu sendiri. Apakah mata pencarian yang tercipta benar-benar berkelanjutan dan memberikan keamanan ekonomi jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat, ataukah hanya menyediakan solusi temporer yang rentan? Pergeseran ini, alih-alih memberdayakan, justru dapat menciptakan struktur ketergantungan baru yang membuat masyarakat lebih rapuh terhadap guncangan eksternal.

Kapitalisasi dan Alih Fungsi Lahan Agrikultur Menjadi Wisata

Salah satu dampak paling nyata dan seringkali merugikan dari pengembangan pariwisata desa adalah alih fungsi lahan agrikultur menjadi area atau fasilitas pariwisata. Isu ini berakar pada proses komodifikasi lanskap, di mana lahan, termasuk yang sebelumnya produktif untuk pertanian, diubah nilainya menjadi aset ekonomi yang berorientasi pada pariwisata. Ristiawan (2024) secara eksplisit membahas bagaimana lanskap di geopark di Indonesia dikomodifikasi untuk tujuan pariwisata, yang secara inheren melibatkan transformasi penggunaan lahan dari fungsi ekologis atau produktif menjadi fungsi estetis dan komersial pariwisata.

Pariwisata membawa serta investasi dan spekulasi lahan, yang secara drastis meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah tujuan wisata. Fenomena ini diuraikan oleh Setiadi et al. (2022) di Ciwidey, di mana kapitalisasi pedesaan melalui pengembangan pariwisata menyebabkan kenaikan harga lahan. Kenaikan harga ini kemudian menciptakan insentif bagi petani untuk menjual lahan pertanian mereka. Meskipun penjualan lahan dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan dalam jangka pendek, terutama bagi petani yang memiliki kepemilikan tanah yang luas, konsekuensi jangka panjangnya jauh lebih kompleks dan seringkali merugikan. Hilangnya lahan pertanian produktif berarti hilangnya sumber mata pencarian tradisional yang berkelanjutan bagi banyak keluarga.

Sukriah (2024) mengidentifikasi tiga pola kapitalisasi lahan untuk pariwisata, yang semuanya mengarah pada peningkatan harga dan seringkali kontrol atas lahan. Investor dapat membeli lahan dan segera mengubahnya menjadi bisnis pariwisata, atau secara bertahap mengakuisisi lahan hingga menciptakan area eksklusif. Pola-pola ini tidak hanya mengerek harga tanah, tetapi juga dapat mengikis kepemilikan lahan masyarakat lokal. Bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian subsisten atau skala kecil, hilangnya lahan berarti kehilangan basis ekonomi dan bahkan identitas budaya mereka. Alih fungsi lahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan lokal, karena area pertanian yang dulunya menyuplai kebutuhan pangan kini digantikan oleh hotel, resort, atau objek wisata. Ketiadaan regulasi yang kuat mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan menjadi celah besar bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat lokal. Sukriah (2024) menekankan perlunya regulasi kepemilikan lahan untuk melindungi masyarakat lokal dari pengambilalihan yang eksploitatif. Tanpa perlindungan ini, "pemberdayaan" melalui pariwisata

justru dapat berubah menjadi "penyingkiran" atau penggusuran tidak langsung, di mana masyarakat didorong untuk menjual tanah mereka dan kemudian menjadi pekerja upahan yang rentan di sektor pariwisata di lahan yang dulunya milik mereka. Transformasi ini bukan hanya perubahan fisik lahan, tetapi juga perubahan fundamental dalam struktur sosial dan ekonomi desa.

Ketimpangan Pendapatan Elit Desa dan Warga biasa.

Salah satu kritik paling fundamental terhadap narasi pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata adalah bahwa alih-alih meratakan kesejahteraan, pengembangan pariwisata justru dapat memperparah ketimpangan pendapatan antara elit desa dengan warga biasa. Sidik (2025) secara khusus mengkaji bagaimana Dana Desa dan pengembangan pariwisata desa dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan, dengan menyoroti peran sentral elit desa dalam membentuk dinamika ini.

Elit desa, yang dapat berupa kepala desa, tokoh adat, pemilik modal lokal, atau individu dengan koneksi politik, seringkali memiliki posisi istimewa dalam proses perencanaan dan implementasi proyek pariwisata. Mereka memiliki akses lebih besar terhadap informasi tentang rencana pengembangan, peluang investasi, dan jaringan dengan pihak luar (investor, pemerintah daerah). Akses superior ini memungkinkan mereka untuk lebih dulu mengakuisisi lahan strategis, mendapatkan lisensi usaha, atau membentuk kemitraan yang menguntungkan. Akibatnya, manfaat ekonomi dari pariwisata cenderung terakumulasi pada segelintir tangan, sementara sebagian besar warga biasa hanya mendapatkan keuntungan yang minim.

Ketimpangan ini terwujud dalam beberapa bentuk: *Pertama* akses sumber daya. Elit desa memiliki akses yang lebih mudah ke modal pinjaman, informasi pasar, dan peluang pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata, dibandingkan dengan warga biasa yang mungkin kekurangan jaminan atau informasi. Sidik (2025) secara implisit menunjukkan bagaimana kontrol atas informasi dan sumber daya ini menjadi penentu dalam distribusi manfaat. Disparitas upah juga menjadi bukti konkret ketimpangan pada sektor pariwisata. Pekerjaan sektor pariwisata pada banyak kasus memiliki jenjang upah yang variatif. Fagertun (2017) menyoroti bagaimana struktur kelas dalam ekonomi pariwisata menciptakan disparitas upah yang signifikan. Pekerja di posisi manajerial, pemilik usaha besar, atau mereka yang memiliki modal besar akan mendapatkan keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja informal, buruh harian, atau penjual kecil. Ramadhani et al. (2023) juga membahas hak-hak tenaga kerja di pariwisata, secara tidak langsung menunjukkan kerentanan pekerja tingkat bawah terhadap upah yang tidak layak. *Kedua* kontrol dan keuntungan.: Investor luar atau pihak elit lokal seringkali mendominasi kepemilikan dan pengelolaan fasilitas pariwisata skala besar. Sukriah (2024) menguraikan bagaimana pola kapitalisasi lahan oleh investor dapat mengarah

pada penciptaan "area eksklusif" di mana keuntungan utama disedot keluar dari komunitas lokal. Meskipun ada peluang bagi Usaha Menengah dan Kecil Masyarakat lokal, keuntungan besar dari aliran wisatawan dan investasi biasanya tidak merata.

Manaf et al. (2018) menyinggung disparitas sosio-ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan, namun ketimpangan ini juga terjadi di dalam internal desa itu sendiri. Jika proyek pariwisata tidak dirancang dengan mekanisme distribusi manfaat yang adil, atau jika tata kelola desa didominasi oleh kepentingan elit, maka pariwisata justru akan memperburuk ketimpangan yang sudah ada. Konsep pemberdayaan, dalam konteks ini, menjadi retorika semata, karena kekuasaan ekonomi dan sosial tetap terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, sementara warga biasa tetap berada di posisi yang rentan dan bergantung. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang sejati tidak hanya tentang menciptakan pekerjaan, tetapi juga tentang memastikan distribusi kekuatan dan manfaat yang lebih merata.

Pengembangan pariwisata desa secara umum dan dapat dipastikan akan merubah orientasi masyarakat pedesaan. Perubahan tersebut meliputi banyak hal mulai dari mata pencaharian hingga alih fungsi lahan. Selain itu, disparitas juga tercipta akibat kesenjangan modal ekonomi, kekuasaan politik desa dan regulasi yang tidak menjamin hak semua golongan. Bagian paling mengkhawatirkan dari eskalasi ini adalah peningkatan secara masif pekerja informal, ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan hingga tidak adanya kejelasan jaminan kerja bagi para buruh pariwisata desa, disisi lain masyarakat desa sudah sepenuhnya meninggalkan pekerjaan tradisional mereka yang sebelumnya. Kondisi alih-alih memberdayakan masyarakat desa, justru menempatkan mereka pada situasi yang rawan terhadap guncangan ekonomi.

Pariwisata desa tetap berpotensi untuk dikembangkan namun harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pengembangan pariwisata desa bukan sebagai prioritas utama yang menggeser orientasi masyarakat desa sebelumnya, melainkan hadir sebagai lapis kedua pendapatan masyarakat desa. Hal ini justru akan lebih sesuai mengingat orientasi wisata desa berbasis komunitas adalah keberlanjutan yang bergantung pada aspek keterikatan terhadap alam, sosial dan budaya masyarakat desa. Kedua harus ada kepastian hak yang merata sehingga kebermanfaatannya tidak diakumulasi oleh segelintir elit desa saja. Terakhir, pengembangan wisata desa harus menjamin regulasi yang adil bagi hak-hak pekerjaannya serta bersifat formal sehingga tidak terjebak dalam kondisi kerja informal yang rentan dan penuh ketidakpastian.

4. CONCLUSION

Kajian ini menemukan setidaknya tiga masalah sosial dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata desa menunjukkan pengembangan pariwisata desa. Tiga masalah utama tersebut adalah

pertama perubahan ekstrem dan ketergantungan terhadap penghasilan sektor pariwisata, *kedua*, alih fungsi dan kapitalisasi lahan, serta *ketriga* disparitas atau kesenjangan sosial dan ekonomi antara elit desa dengan warga masyarakat.

REFERENCES

- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398-413.
- Fagertun, A. (2017). Labour in paradise: Gender, class and social mobility in the informal tourism economy of urban Bali, Indonesia. *The Journal of Development Studies*, 53(3), 331-345.
- Lasso, A., & Dahles, H. (2018). Are tourism livelihoods sustainable? Tourism development and economic transformation on Komodo Island, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(5), 473-485.
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 10(7), 2142.
- Ramadhani, Z. A., Alidha, S. Y., & Furqan, A. (2023). Kajian Literatur Tuntutan Hak Tenaga Kerja Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 4(2), 169-178.
- Ristiawan, R. (2024). *Commodifying landscapes for tourism: Insights from land use transformation in Indonesian geopark tourism developments* (Doctoral dissertation, Wageningen University and Research).
- Setiadi, H., Rizqihandari, N., Setiadi, A., Fikri, G. I., & Indratmoko, S. (2022). Rural capitalization and agrarian transformation in the Ciwidey highlands, West Java, Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 33(3), 281-299.
- Sukriah, E. (2024). Land capitalization model for sustainable tourism based on PLS-SEM. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 600, p. 06004). EDP Sciences.
- Sidik, F. (2025). The Village Fund, Village Tourism Development, and Its Impact on Income Inequality in Rural Indonesia: How do Village Elites Shape It?. *Tourism Planning & Development*, 22(1), 111-137.
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Pariwisata Bali atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Pandemi Covid- 19.

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2), 357-375